

Konstruksi Makna Ideologi Partai bagi Politisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Evie Ariadne Shinta Dewi¹, Vera Wijayanti Sutjipto*², Suwandi Sumartias³, Hanny Hafiar⁴

^{1,3,4}Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

²Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: 1evie@unpad.ac.id, 2vera.kistijantoro@gmail.com, 3suwandi.sumartimas@unpad.ac.id, 4hanny.hafiar@unpad.ac.id



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>

VOL. 7, NO. 1 (2026)

Page: 86-100

Recommended Citation (APA Style):

Constructing the Meaning of Party Ideology for Women Politicians of the Prosperous Justice Party (PKS). (n.d.). Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 7(1).

<https://doi.org/10.15408/jisi.v7i1.41366>

Available at:

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/35002>

Article History:

Received: 2024-09-19

Accepted: 2026-06-28

Available online: 2026-06-29

* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstract. The meaning of ideology within a political party is related to the way politicians understand their party's ideology. Therefore, all politicians, including female politicians, have their own meaning construction according to their understanding. This study aims to find out the meaning of party ideology constructed by PKS female politicians. Constructivism is the paradigm used in this research with phenomenological methods. The sources of this research are 14 PKS female politicians who are currently legislative members at the national, provincial, city or district level for the service period 2019 to 2024. The results of this study indicate that there are two meanings of political party ideology built by PKS women politicians, namely religious meaning and humanistic meaning. The first meaning is the religious meaning, which consists of adhering to *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a* and *Bayan and Da'wah Tarbiyah*. The second meaning is the humanistic meaning, which is having good morals, making political life a part of everyday life, showing justice and welfare, having a sense of happiness, as well as *walidatul umat* and strengthening the *Ummah*.

Keywords: Meaning, Party Ideology, Women Politicians, PKS, Phenomenology

Abstrak. Pemaknaan ideologi di dalam sebuah partai politik berhubungan dengan cara pandang politisi terhadap ideologi partainya. Oleh karena itu, semua politisi tidak terkecuali politisi perempuan memiliki konstruksi makna tersendiri sesuai dengan pemahamannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna ideologi partai politik yang dibangun oleh politisi perempuan PKS. Konstruktivisme merupakan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode fenomenologi. Narasumber dari penelitian ini adalah 14 orang politisi perempuan PKS yang sedang menjadi anggota legislatif baik di tingkat nasional, provinsi, kota atau kabupaten masa bakti 2019 sampai 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna ideologi partai politik yang dibangun oleh politisi perempuan PKS ada dua makna yaitu makna agamis dan makna humanis. Makna pertama adalah makna agamis, dimana terdiri dari berpegang teguh pada *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a* dan *bayan* serta *dakwah tarbiyah*. Makna kedua adalah makna humanis yaitu berakhlak yang baik, kehidupan politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menunjukkan keadilan dan kesejahteraan, memiliki perasaan bahagia, serta *walidatul umat* dan pemberdayaan umat.

Kata Kunci: Konstruksi Makna, Ideologi Partai, Politisi Perempuan, PKS, Fenomenologi.

1. PENDAHULUAN

Selain ideologi Pancasila sebagai ideologi dasar bagi setiap partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, secara konseptual seyogyanya setiap parpol memiliki ideologi sebagai nilai dasar perjuangan politiknya. Bahkan lebih jauh, ideologi partai akan tercermin tidak hanya dalam sistem dan struktur organisasi partai, tetapi juga dalam sikap dan perilaku para anggotanya. Ideologi partai politik menjadi bagian dari nilai-nilai yang dianut oleh anggota partai, sebagai hasil dari proses internalisasi nilai-nilai dalam institusi partainya.

Pada prakteknya, upaya penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi parpol, bisa saja dimaknai secara berbeda oleh setiap anggota, mengingat makna dikonstruksi berdasarkan pengalaman subjektif masing-masing individu. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap ideologi dalam sebuah partai politik berkaitan dengan cara pandang para politisi terhadap ideologi partainya.

Penelitian ini memfokuskan konstruksi makna atas ideologi partai politik bagi politisi perempuan berdasarkan pada pengalaman masing-masing.

W. Barnet Pearce dan Vernon Cronen (dalam West dan Turner, 2008: 115-117), dalam teorinya: *Cordinated Management Of Meaning (CMM) Theory*, menjelaskan tentang makna dan pembentukan makna dengan beberapa asumsi: 1). Manusia hidup dalam komunikasi, 2). Manusia saling menciptakan realitas, 3). Transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal.

Mengacu pada teori CMM di atas, politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam berkomunikasi dengan semua *stakeholders*nya dapat menciptakan realitas subjektif atas ideologi partai berdasarkan pada transaksi informasi yang dialaminya baik personal maupun interpersonal.

Ideologi sendiri didefinisikan sebagai kepercayaan, perilaku, nilai-nilai atau seperangkat keyakinan yang mengikat anggotanya agar tujuan organisasi tersebut tercapai (Ordabayeva & Fernandes, 2018). Ideologi merupakan keyakinan politik, dimana ide-ide dan nilai-nilai yang dibentuk untuk

kepentingan kelas sosial tertentu agar membangkitkan perasaan kepemilikan kolektif (Heywood, 2012). Kolektifitas perasaan ini didasari oleh sikap dan otoritas yang akan dibentuk oleh partai politik melalui ideologi yang mereka anut. Untuk itu, ideologi partai politik menjadi penting manakala partai menentukan karakteristik masyarakat yang akan menjadi basis perjuangan mereka (Gerald, 2019). Selain itu, ideologi partai politik juga memberikan arahan kepada politisi partai terkait dengan nilai-nilai yang harus diperjuangkan agar dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat.

Pada umumnya sejarah awal partai politik dibentuk dan didasari dari ideologi yang diperjuangkan oleh anggota partai politik (Joly et al., 2018). Beberapa akademisi menjelaskan bahwa ideologi partai politik menjadi dasar untuk menyusun visi dan misi partai dalam menjalankan pemerintahan (Natter et al., 2020; Faustino et al., 2019). Hadirnya ideologi di tengah partai politik memberikan arah kepada partai untuk memainkan fungsinya di masyarakat (Geana et al., 2021). Ideologi partai politik juga menjadi alat untuk melakukan berbagai strategi sosialisasi yang akan diberikan kepada masyarakat (Hajad, 2022; Van Bavel & Pereira, 2018; Eagleton, 1991).

Di Indonesia, sampai saat ini terdapat tiga partai politik yang memiliki ideologi berbasis agama Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Kusmayadi, 2018).

PPP menjadi salah satu partai yang dinilai tua dan tradisional. Meskipun dikenal dengan partai Islam, PPP mencoba melakukan perubahan ke arah partai nasionalis religius. Sebagai partai Islam, PPP berusaha ingin mengubah stigma yang awalnya dinilai sebagai partai tua dan tradisional menjadi partai muda dan modern (Ariffin, 2019).

Selain itu, PKB dikenal dengan partai Islam yang terbentuk dari perjuangan jam'iyah Nahdatul Ulama (NU). Sehingga, kekuatan politik mereka berpaham pada agama Islam dan memberikan tempat terhormat kepada tokoh agama. Dengan kata lain, PKB sebagai partai Islam melakukan branding bahwa partainya lekat dengan NU (Supawi, 2023).

Berbanding terbalik dengan partai berbasis Islam lainnya, PKS yang terbentuk ditengah reformasi, berdiri dengan dukungan para aktivis kampus yang melakukan dakwah kampus dan melihat kesempatan ditengah rezim orde baru yang tumbang (Yuniartin, 2018), sampai kemudian, para aktivis tarbiyah tersebut mendirikan partai berideologi Islam yang dikenal dengan nama PKS pada bulan Agustus 1998 (Nurhakim, 2023).

Dalam konteks ideologi politik, PKS dikenal sebagai partai berbasis agama Islam baru yang dalam setahun setelah didirikannya mampu meraih kesempatan untuk mengikuti pemilu dan dapat menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PKS memiliki perbedaan dengan dua partai Islam lainnya yaitu dari penerapan konsep dan gerakan dakwah PKS yang didasari oleh gerakan Ikhawanul Muslimin (Pohan, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sistem kaderisasi PKS lebih ketat dibandingkan dengan partai lainnya (Herdiansah, 2021; Iswandi, 2020). Hal ini dikarenakan PKS dikenal sebagai partai kader yang menjaring anggotanya melalui berbagai tahapan seleksi, atau dikenal dengan tarbiyah (pendidikan dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi fisik intelektual, sosial dan spiritual kader) (Anwar et al., 2020). Nurdin, Taufan dan Prayitno (2019:113-114) menambahkan bahwa PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan politiknya.

Di sisi lain, sebagai partai berbasis agama Islam, PKS tidak menutup diri dengan keterwakilan perempuan untuk duduk dibangku legislatif. Sejak adanya kebijakan *affirmative action*, PKS mendorong politisi perempuan di partainya agar mereka dapat dipilih oleh masyarakat. Sayangnya, meskipun PKS berhasil memenuhi quota Calon Anggota Legislatif lebih dari 30% perempuan pada pemilihan umum 2019, namun hanya sedikit yang berhasil menjadi anggota legislatif terpilih.

Pada periode 2014-2019, keterwakilan perempuan PKS di DPR RI hanya 1 orang (Umagapi, 2020). Lalu pada tahun 2018, PKS mendaftarkan 538 orang caleg dengan jumlah laki-laki sebanyak 236 orang dan perempuan sebanyak 212 orang (Kompas.com, 2018), dan caleg PKS yang berhasil duduk dibangku DPR RI

periode 2019-2024 yaitu 50 orang dengan jumlah laki-laki 41 orang dan 9 orang perempuan (Salfa, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif dari yang tadinya hanya satu orang pada tahun 2014, menjadi sembilan orang pada 2019.

Menarik untuk dicermati dalam sistem kepartaian PKS, terdapat aturan dan rambu-rambu khusus bagi politisi perempuan. Seperti tercantum di dalam buku pedoman Dewan Syariah Partai (DSP), terdapat tiga bab yang terkait dengan perempuan. Rujukan tersebut menunjukkan bahwa PKS menganggap pentingnya perempuan di dunia politik (Fauzi et al., 2019). PKS memberikan kesempatan dan dukungan yang lebih besar kepada kader perempuan (Bakiyah et al., 2018). Kesempatan dan dukungan tersebut tertuang dalam buku pedoman DSP yang mengarahkan agar politisi perempuan dapat memaknai nilai-nilai Islam sehingga mereka kuat menghadapi tantangan dunia politik (Yasin, 2017). PKS juga menempatkan politisi perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah yang sesuai dengan kuota 30 persen (Ramadhany & Rahmawati, 2020; Andrias & Widiastuti, 2011). Umumnya mereka ditempatkan pada nomor urut tiga kemudian ditempatkan lagi di nomor kelipatan tiga (Andari & Adnan, 2018; Haryati et al., 2017).

PKS sebagai partai berbasis agama Islam memiliki ideologi partai yang tercermin dalam struktur organisasi dan sistem partai politik. Salah satu sistem politik PKS terdapat pada kegiatan rutin yang dinamai tarbiyah (Noor, 2017). Tarbiyah merupakan gerakan dakwah yang dimiliki oleh PKS. Materi yang disampaikan melalui tarbiyah salah satunya adalah adab-adab Islam terkait pedoman bagaimana perempuan berperilaku ketika menjalankan peran-nya dalam dakwah dan politik (Karenina et al., 2023). Gerakan dakwah tersebut dilakukan melalui kegiatan liqo.

Peneliti mencermati bahwa pedoman terkait dengan adab-adab tersebut menjadi aturan utama bagi kader perempuan PKS. Gerakan dakwah tarbiyah menjadi kegiatan yang harus dilakukan oleh kader perempuan yaitu dengan menghadiri pengajian mingguan

atau dikenal dengan liqo (Yuniartin, 2018). Kehadiran politisi perempuan PKS dalam kegiatan liqo menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para kader.

Dalam pencermatan awam peneliti, tarbiyah dan Liqo ini memosisikan kader perempuan pada situasi yang dilematis. Sebagai perempuan yang memiliki keluarga tentu mereka juga memiliki kewajiban untuk memprioritaskan agenda keluarga (Andari & Adnan, 2018), namun dengan adanya kewajiban tarbiyah dan liqo yang intens, peneliti mencermati bahwa agenda keluarga tidak dapat lagi menjadi prioritas karena beban mereka semakin bertambah ketika memiliki kewajiban membina kader-kader partai yang levelnya dibawah mereka.

Pembinaan terhadap kader dibawah level ini dikenal dengan murabbiyah. Tugas seorang murabbiyah, tidak hanya membahas mengenai masalah agama atau politik saja, mereka juga terlibat dalam masalah-masalah personal dari muridnya. Keterlibatan murrabiyah terhadap masalah kader dibawah level mereka membuat peran sebagai politisi perempuan PKS memiliki tanggung jawab yang besar layaknya politisi laki-laki.

Lebih jauh, perjalanan untuk menjadi politisi perempuan tidaklah mudah karena proses yang dilalui begitu panjang. Menurut Soedarwo (2014), seorang politisi perempuan dituntut harus aktif di sektor publik dan juga harus terlibat dalam kegiatan di sektor domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan dituntut untuk berperan ganda. Sedangkan, nilai-nilai Islam yang disampaikan PKS khususnya terkait dengan adab berhubungan dengan nilai mengenai fitrah dan tugas perempuan muslimah sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya demi mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

Peran ganda terhadap politisi perempuan PKS ini menimbulkan pertanyaan mendalam bagi peneliti dan mendorong peneliti untuk mengidentifikasi konstruksi makna politisi perempuan terhadap ideologi partai politiknya.

Kondisi ini menimbulkan *curriosity* peneliti bagaimana konstruksi makna ideologi partai bagi politisi perempuan PKS selama

mengimplementasikan adab-adab yang didasari oleh buku pedoman DSP. Peneliti mencermati bahwa menginternalisasikan adab PKS kepada masyarakat dan kader lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap politisi perempuan PKS. Karena itulah, Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul penelitian ini, "Konstruksi Makna Ideologi Partai bagi Politisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)".

2. METODE

Merujuk pada teori fenomenologi Alfred Schutz (1967), bahwa pemaknaan nilai-nilai tertentu dipegaruhi intersubjektif antar aktor yang harus dilihat secara historis, hal ini relevan dengan asumsi peneliti bahwa politisi perempuan PKS memaknai nilai-nilai Islam melalui interaksi dan intersubjektif antar para politisi dan konstituen yang dilihat secara historis mulai dari dia memutuskan jadi politisi sampai menjadi anggota legislatif.

Konsisten dengan asumsi Schutz, maka penelitian ini layak menggunakan paradigma konstruktivisme, karena menekankan pada pemikiran dan konstruksi realitas yang dibentuk secara sosial dan pengalaman (Denzin & Lincoln, 2009). Mengacu pada Guba, paradigma konstruktivisme dapat dijelaskan dengan empat dimensi yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis dan metodologis.

Dimensi ontologis merupakan relativisme konstruktivisme, di mana realitas sosial yang beraneka ragam bisa dipahami. Tujuan penelitian konstruktivisme adalah merekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku sosial yang diteliti. Dimensi ontologis pada penelitian ini adalah bagaimana kontruksi makna politisi perempuan PKS atas ideologi partainya, terutama ketika mereka sedang melakukan aktivitas politik yang dituntut tetap berada dalam koridor aturan Islam sebagai landasan dasar partai.

Dimensi epistemologi menakar hubungan antara peneliti dan yang diteliti, untuk memperoleh pengetahuan atas objek yang diteliti, sehingga kemudian menggambarkan bagaimana cara pengetahuan disusun dari materi yang diperoleh dalam prosesnya penggunaan metode ilmiah. Dalam dimensi

epistemologi, pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti atau dikenal dengan istilah transaksional/subjektivis. Konstruksi makna ideologi politik parpol oleh politisi perempuan PKS dalam riset ini adalah hasil dari dialektika antara peneliti dengan subjek yang ditelitinya, yakni para politisi perempuan tersebut.

Dimensi aksiologis, berhubungan dengan value judgment, etika dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian. Moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian, sehingga dalam hal ini penelitian dianggap sebagai fasilitator. Peneliti tidak melakukan penghakiman atas nilai-nilai yang dikonstruksi oleh informan terkait makna ideologi Islam parpol PKS. Peneliti berperan sebagai *passionate participant* yaitu fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial.

Seperti dinyatakan di atas, penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai:

What is the meaning, structure and essence of the lived experience of this phenomenon for this person or group of people? (Patton, 2002:104)

Fenomenologi berusaha mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang dialami oleh individu atau sekelompok individu, di mana fenomena ini merupakan makna, struktur dan esensi yang dialami oleh individu atau sekelompok individu tersebut.

Fenomenologi menurut Husserl adalah studi mengenai bagaimana individu menggambarkan mengenai sesuatu berupa pengalaman mereka melalui panca indra (Asih, 2005). Asumsi filosofis Husserl yang paling mendasar adalah manusia hanya akan mengetahui pengalaman mereka dengan mengikuti persepsi dan makna yang membangunkan kesadaran yang mereka sadari. Pada awalnya dimulai dari semua pemahaman kita melalui pengalaman panca indera terhadap sebuah fenomena, tapi pengalaman tersebut harus digambarkan, diutarakan dan diinterpretasikan (Patton, 2002:104).

Subjek penelitian atau disebut juga dengan informan adalah orang yang diminta keterangan mengenai suatu fakta (Arikunto, 2006). Subjek penelitian dipilih dengan cara purposive sampling dalam upaya menemukan informan yang sampelnya mempunyai kriteria tertentu berasal dari pertimbangan dan penilaian peneliti (Neuman, 2003:213). Penelitian ini menggunakan kriteria informan Spradley (1980), dimana terdapat lima kriteria pemilihan informan dalam proses penelitian yaitu:

- a. Cukup lama dan intensif dengan informasi yang akan informan berikan.
- b. Masih terlibat penuh dengan kegiatan yang diinformasikan
- c. Mempunyai cukup banyak waktu untuk memberikan informasi
- d. Tidak dikondisionalkan ataupun direkayasa dalam pemberian informasinya.
- e. Siap memberikan informasinya dengan ragam pengalamannya

Dalam riset ini, subjek penelitian adalah politisi perempuan PKS yang menjabat sebagai anggota legislatif pada tahun 2019-2024 baik itu di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan kriteria khusus yang ditetapkan oleh peneliti, mencakup:

1. Politisi perempuan PKS yang memiliki pengalaman pernah menjabat anggota legislatif, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten.
2. Politisi perempuan PKS bersedia untuk memberikan informasinya dengan ragam pengalamannya baik secara langsung maupun tatap muka.

Berdasarkan jumlah anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta kriteria yang sudah disusun oleh peneliti, jumlah informan yang dipilih sebanyak 14 orang (Lihat Tabel.1), terdiri dari anggota DPR-RI politisi perempuan PKS sejumlah 9 orang. Dari 9 orang tersebut, peneliti melakukan proses komunikasi melalui Direct Message via Instagram dan WhatsApp. Namun, hanya 3 orang yang bersedia untuk membantu penelitian ini. Sedangkan anggota DPRD Provinsi yang dipilih oleh peneliti sebanyak dua orang yang bersedia untuk diwawancarai.

Begitu juga dengan anggota DPRD Kabupaten/Kota hanya 9 anggota yang merespon dan bersedia untuk dilakukan wawancara lebih lanjut. Karena saat pengumpulan data bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19, 10 informan

menyatakan bersedia diwawancara melalui zoom, namun ada pula yang bersedia diwawancarai tatap muka walaupun kondisi masih pandemi. Berikut daftar subjek penelitian yang bersedia ikut serta dalam penelitian ini:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian.

Nama	Lokasi Lembaga Legislatif	Periode Jabatan Pertama	Periode Jabatan Kedua	Periode Jabatan Ketiga
SLR	DPRD Kota Tangerang Selatan	2014-2019	2019-2024	-
LHA	DPR RI	2009-2014	2014-2019	2019-2024
AR	DPRD Jawa Barat DPRD Kab Bekasi	2009-2014 -	2014-2019 -	2019-2014
AM	DPRD Kab Subang	2014-2019	2019-2024	-
ETO	DPRD Kab Lumajang	20014-2019	2019-2024	-
S	DPRD DKI Jakarta	2004 – 2009	2019-2024	-
KM	DPR RI	2014-2019	2019-2024	-
FH	DPRD Kab Bekasi	2014-2019	2019-2024	-
NZ	DPR RI	2019-2024	-	-
RH	DPRD Kota Tasikmalaya	2009-2014	2014-2019	2019-2024
LN	DPRD Kota Bekasi	2014-2019	2019-2024	-
N	DPRD Kota Kediri	2014-2019	2019-2024	-
KIP	DPRD Kota Cimahi	2014-2019	2019-2024	-
SR	DPRD Kota Bandung	2014 - 2019	2019-2024	-

Sumber: Data peneliti

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Adapun analisis data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, mulai dari saat observasi, studi literature serta saat pengumpulan data wawancara dimulai dan setelah pengumpulan data selesai.

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan triangulasi. Moleong (2017) menunjukkan bahwa uji keabsahan data memiliki dua fungsi yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai. Selain itu, keabsahan data dilakukan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi ahli.

Triangulasi ahli merupakan penelaahan data oleh ahli dalam menentukan keakuratan dan relevansi informasi dengan penelitian. Dalam penelitian ini, proses triangulasi ahli didukung oleh narasumber ahli yaitu Prof. Dr. Lely Arriane,

seorang Guru Besar di bidang Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Nasional.

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana politisi perempuan PKS berupaya untuk memaknai ideologi partainya melalui internalisasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam ideologi parpol. Menurut Iswandi (2020b), ideologi politik Islam menjadi salah satu dinamika klasik yang mengakar sampai saat ini, di mana ideologi partai politik menjadi penting bagi terlaksananya visi dan misi partai. Partai politik sendiri dikenal sebagai organisasi yang memiliki aktivitas politik, di mana upaya untuk menguasai pemerintah dan merebut dukungan rakyat dari persaingan antar golongan yang terdapat di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS adalah partai Islam yang berupaya dikenal oleh masyarakat melalui kinerja kader mereka yang ada di lembaga legislatif. Studi ini juga didukung oleh Yilmaz et al. (2016) di mana partai Islam tidak hanya mementingkan moral individualisasi tetapi juga membela nilai-nilai

kesetaraan dan kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Secara teoretik, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik serta pendidikan politik. Di dalam proses sosialisasi dan pendidikan politik juga rekrutmen politik, komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, berperan penting dalam aktivitas para kadernya. Misalnya berupa pemikiran politik, pembicaraan politik dan tindakan politik (Arifin, 2015).

Dalam konteks fungsi-fungsi partai politik ini, kader PKS juga memiliki fungsi komunikasi politik, apakah ketika sedang melakukan tarbiyah, murabiyah maupun saat berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat umum. Komunikasi politik para kader ini sangat ditentukan oleh bagaimana para kader memaknai ideologi parpol sebagai basis mereka berkomunikasi dengan *stakeholders*.

Selain fungsi, partai politik juga memiliki klasifikasi yaitu dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, segi sifat dan orientasi serta segi jumlah sistem partai yang ada dalam suatu negara.

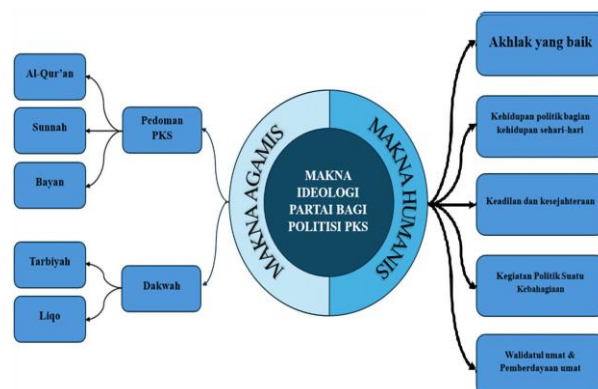
Dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai PKS merupakan partai kader. Partai kader merupakan partai yang mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Dapat dilihat dari hasil temuan terhadap politisi perempuan PKS yang mengkonstruksikan makna ideologi menunjukkan loyalitasnya kepada partai.

Dilihat dari segi sifat dan orientasi, PKS masuk ke dalam partai ideologi. Perspektif tersebut dapat diidentifikasi dari pedoman yang dimiliki oleh PKS dan tertuang ke dalam Bayan DSP PKS. Menurut Prasetya (2011), dari segi ideologi partai politik terbagi menjadi partai politik yang berideologi Islam, Nasionalis sekuler, nasionalis religius dan Kristen. Dilihat dari bentuk partai, pedoman yang digunakan dan syariat yang dilakukan jelas bahwa PKS termasuk ke dalam ideologi partai Islam. Maka dari itu, unsur yang ada pada PKS dilihat dari lambang dan asasnya sejalan dengan partai Islam.

Politisi perempuan PKS memiliki ciri khas yang mudah dikenali dibanding politisi perempuan partai lainnya, tanpa harus menggunakan atribut atau logo partai, masyarakat dapat langsung mengenali mereka. Ini karena politisi perempuan PKS umumnya menggunakan pakaian dan hijab yang panjang. Penggunaan hijab dan pakaian

panjang ini masuk ke dalam salah satu pedoman PKS di mana dalam berpakaian harus memiliki adab.

Secara fenomenologis, makna yang ditemukan dalam penelitian ini secara sederhana dapat dicermati dalam gambar 1.



Gambar 1. Konstruksi Makna Ideologi Parpol oleh politisi perempuan PKS.

Berdasarkan analisis data penelitian, terdapat dua makna yang dikonstruksikan oleh politisi perempuan PKS yaitu makna agamis dan makna humanis. Berikut ini adalah tipikasi konstruksi makna politisi perempuan PKS.

3.1. Makna Humanis

Makna memiliki arti yang mendalam dan sangat penting. Karena makna dipahami sebagai hakikat yang muncul dari sebuah objek akibat dari upaya pembaca mengungkapkannya (Rohman, 2013). Sehingga, makna tidak bisa dengan mudahnya muncul tetapi makna dihasilkan dari hubungan antar unsur baik di dalam maupun di luar. Dalam penelitian ini, makna intensional adalah makna yang muncul dari dalam diri politisi perempuan tersebut. Dilihat dari jenis makna, hasil penelitian ini termasuk ke dalam makna konotatif dan makna emotif. Makna konotatif ini muncul karena adanya asosiasi perasaan terhadap apa yang diucapkan maupun didengar. Sedangkan makna emotif timbul karena adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara terhadap sesuatu yang dipikirkan ataupun dirasakan. Oleh karena itu, peneliti mengkonstruksinya ke dalam makna humanis.

Bagi politisi perempuan PKS, ideologi partai tersebut dimaknai dengan konstruksi makna humanis. Mereka merasakan sendiri wujud implementasi dari pedoman ke dalam

perilaku. Umumnya politisi perempuan PKS menyampaikan kalimat *Rahmatan Lil Alamin* atau kebaikan untuk bersama, yang dianggap sebagai makna humanis karena berhubungan dengan Gerakan Kemanusiaan. Sehingga, dari kalimat tersebut tumbuh kewajiban bagi politisi perempuan untuk memiliki akhlak yang baik. Mengingat kepanjangan dari PKS adalah Partai Keadilan Sejahtera, sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai syariat Islam, makna humanis juga lekat dengan keadilan dan kesejahteraan sebagai wujud dari implementasi *rahmatan lil alamin*.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi perempuan PKS juga menjalankan visi dari partai sebagai bentuk melayani rakyat. Sehingga, politisi perempuan PKS yang juga kader diharapkan oleh partainya memahami agama Islam dengan baik. Jelas makna humanis ini berkaitan erat dengan menghidupkan kembali sifat perikemanusiaan serta mencita-citakan pergaulan hidup yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hefni (2017) yang menyatakan makna *rahmatan lil alamin* akan terwujud manakala terjadi keseimbangan *hablun minallah* dan *hablun minnas*. Politisi perempuan PKS menyadari bahwa beribadah saja tidak hanya sebatas menjalankan solat dan membaca al-Qur'an. Namun, mereka juga ikut turut serta menjaga hubungan dengan manusia dengan cara *rahmatan lil alamin*.

Temuan lainnya, kehidupan politik yang dilakukan oleh politisi perempuan PKS menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan pemaknaan ini tidak hanya tumbuh karena adanya konstansi pemilihan umum yang menjadikan politisi perempuan PKS harus melakukan kegiatan berbentuk *rahmatan lil alamin*, melainkan karena PKS telah melakukan pembinaan dan menetapkan buku pedoman yang harus dipatuhi sejak mereka masuk ke dalam partai melalui kegiatan *liqo*.

Temuan berikutnya, kegiatan politik yang dilakukan oleh politisi perempuan menjadi kebahagiaan karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Ramadhani (2021) terkait dengan relevansi ideologi yang aplikatif. Dalam studi Ramadhani, ideologi yang ditelusuri adalah ideologi keagamaan dari pemikiran

salah satu tokoh Islam. Sedangkan, penelitian ini menunjukkan bahwa pada tataran ideologis, pedoman Bayan DSP PKS menjadi fondasi bagi pendidikan politik politisi perempuan PKS. Pada tataran aplikatif dari pedoman Bayan tersebut diimplementasikan ke dalam praktik *rahmatan lil alamin*, yang dijadikan sebagai visi yang kokoh dan diwujudkan dengan melayani rakyat.

Disamping itu, politisi perempuan PKS juga menilai bahwa PKS memiliki tujuan mewujudkan kedamaian dan kasih sayang. Sehingga, mereka dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan perspektif Gerald (2019) di mana PKS dianggap sebagai partai yang memiliki diferensiasi ide dan nilai serta gagasan politik yang khas. Ketika berbicara terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, politisi perempuan PKS menunjukkan perannya sebagai anggota legislatif di mana mereka ikut memperjuangkan hak konstituenya.

Menariknya, gagasan politik yang khas dari PKS ini telah merasuk dalam relung politisi perempuan di mana mereka memperjuangkan hal baik melalui dana perjuangan. Memaknai ideologi dengan *rahmatan lil alamin* menjadikan politisi perempuan harus bersiap dengan segala resiko yang ada. Salah satunya adalah mempersiapkan dana perjuangan atau dana infak. Dana ini umumnya dikeluarkan secara mandiri sejak politisi perempuan tersebut ditunjuk partai untuk maju sebagai calon anggota legislatif.

AM, KIP dan RH yang merupakan politisi perempuan PKS menyatakan bahwa dana tersebut tidak sebanding dengan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika melakukan kebaikan. Ini sejalan dengan ideologi partai mereka, di mana PKS mendorong politisi perempuan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk kebaikan bersama (*rahmatan lil alamin*).

Politisi perempuan juga memaknai ideologi partai mereka sebagai *walidatul umat*, yang secara harfiah berarti kesatuan umat, artinya umat Islam bersatu merupakan kesatuan jamaah Islamiah yang berporoskan pada musyawarah atau *ijma*.

Hasil studi ini menunjukkan komitmen PKS sebagai partai dengan ideologi dan nilai yang dianut sebagai partai dakwah. Penelitian ini juga sejalan dengan studi Wahyudi (2022) di mana dalam praktik dan kerja politik yang terbuka, PKS tetap memperhitungkan dasar keputusannya berdasarkan nilai keislaman.

Walaupun pada kenyataannya, politisi perempuan PKS menyadari masih terjadi perbedaan pandangan dengan sesama kader PKS. Namun, politisi perempuan PKS meyakini bahwa perbedaan ini bukanlah masalah bagi mereka karena yang mempersatukan mereka adalah Al-Quran. Politisi perempuan PKS juga beranggapan bahwa perbedaan ini bukan masalah karena mempunyai tujuan yang sama yaitu *Amal Makruf Nahi Mungkar* yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran di muka bumi. Temuan tersebut sejalan dengan AD ART yang ada pada PKS di mana fungsi partai untuk memelihara keutuhan NKRI. Berdasarkan AD ART dan temuan penelitian menunjukkan bahwa kesatuan umat yang dimaknai oleh politisi perempuan selain Al-Qur'an tetapi juga sebagai bentuk memelihara keutuhan NKRI.

Dari hasil temuan makna humanis ini menunjukkan bahwa ideologi PKS dimaknai oleh anggotanya sebagai nilai-nilai dasar untuk memiliki akhlaq yang baik, memiliki keadilan dan kesejahteraan serta mampu menjadi walidatul umat dan memberdayakan umat.

Selain itu, secara individual, ideologi PKS juga memberikan makna bahwa kehidupan politik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga, anggotanya akan memiliki perasaan yang bahagia karena dapat bermanfaat untuk sesama.

3.2. Makna Agamis

Agama memiliki fungsi bagi manusia yang dapat mendasari terjadinya dinamika sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya sebatas mendasari dinamika sosial tetapi juga dinamika politik. Setidaknya itu yang dimaknai oleh politisi perempuan PKS bahwa, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Dalam prakteknya, agama memiliki fungsi di dalam masyarakat salah satunya adalah sebagai *social control*. Pada fungsi kontrol sosial

ini, para penganut agama menjadikan ajaran agama yang dipeluknya mengikat hati baik secara pribadi maupun secara kelompok. Sehingga, ajaran agama dianggap sebagai norma yang berfungsi untuk pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini di mana politisi perempuan PKS menjalankan nilai-nilai yang dipegang teguh yang berasal dari Al Qur'an dan Hadits.

Sebagai partai Islam, PKS berpedoman pada nilai-nilai yang ada di Al Qur'an dan Hadis yang sekaligus menjadi norma bagi pengikutnya. Dengan kata lain, politisi perempuan PKS memaknai ideologi partai sesuai dengan agama yang mereka anut. Di samping itu, dari nilai-nilai tersebut diturunkan sebagai berikut: 1) *at-tawassuth* (pola pikir moderat), di mana mereka menempatkan diri antara dua kutub terhadap berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai sebuah kebenaran; 2) *al i'tidal* (berdiri tegak) di mana berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada kebenaran dan yang harus dibela; 3) *at-tasamuh* (pola pikir toleran) yaitu sikap toleran, menghargai dan mengerti pihak lain tanpa mengorbankan pendirian; dan 4) *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu nilai yang menyeru dan mendorong untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan beragama dan kemanusiaan.

Keempat nilai tersebut menjadi dasar bagi politisi perempuan PKS untuk dapat berada ditengah masyarakat mengamalkan sikap hidup *rahmatan lil alamin*.

Disisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan fenomena di mana PKS mendorong politisi perempuannya untuk ikut berkontribusi dalam berdakwah. Sehingga, mereka memaknai bahwa partai PKS memberikan wadah bagi mereka untuk menyalurkan kontribusi kebaikan. Salah satu bentuk kebaikan itu dilakukan melalui dakwah. Hal ini sejalan dengan studi Suryana (2021) bahwa politik yang dimaknai oleh PKS merupakan salah satu medium dakwah. Oleh sebab itu, pola komunikasi yang dijalankan oleh PKS dilakukan melalui kajian-kajian Islam dan politik. Untuk itu, politisi perempuan PKS memaknai ideologi partai mereka adalah partai dakwah.

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa politisi perempuan PKS memaknai ideologi partainya sebagai partai yang agamis. Partai agamis ini berpedoman pada aturan-aturan agama, sedangkan partai dakwah merupakan partai yang menyampaikan dan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran agama. Sehingga, politik menjadi bagian dari dakwah yang merupakan suatu tindakan untuk memengaruhi manusia ikut pada kegiatan politik Islami melalui dakwah.

Penelitian ini memberikan kita pemahaman bahwa makna bergantung pada perspektif yang digunakan untuk mengkaji proses komunikatif. Konsistensi yang ditunjukkan oleh politisi perempuan PKS dalam setiap penyampaiannya terkait dengan ideologi partai politik mereka memberikan gambaran bahwa makna dimengerti sebagai hakikat yang muncul dari objek akibat dari upaya mereka mengungkapkannya. Hal ini dikarenakan pemaknaan mengenai ideologi itu tidak dapat muncul dengan sendirinya karena makna yang mereka miliki berasal dari hubungan-hubungan antar unsur di dalam dan luar dirinya. Perannya sebagai kader dan keaktifannya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh partai menjadi kesatuan yang menunjukkan dirinya memahami peristiwa yang menjadi tujuan objek yang diciptakan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diselaraskan dengan aspek-aspek dari makna yaitu pada aspek sense politisi perempuan PKS menggunakan bahasa yang sama ketika berbicara mengenai makna humanis dan makna agamis. Ketika berbicara mengenai ideologi partai PKS, maka mereka memahaminya sebagai partai Islam dan partai dakwah. Sehingga, penerima pesan tersebut dapat memahaminya secara langsung.

Sedangkan pada aspek feeling ditunjukkan pada sikap pembicara ketika mereka menjelaskan terkait dengan makna humanis. Makna humanis menjadi gerakan sebagai aliran berpikir untuk menempatkan serta memperlakukan manusia secara lebih manusiawi. Berbicara mengenai rahmatan lil alamin terdapat semangat yang ditunjukkan karena mereka merasa bahwa misi oleh Allah untuk menciptakan kehidupan sosial yang saling menghargai, tidak ada penindasan

kepada sesama manusia, dan adanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia tanpa dibatasi oleh suku, bahasa dan agama karena adanya *rahman* dari Allah. Aspek makna nada pun tidak bisa dihilangkan ketika berbicara dengan politisi perempuan. Walaupun ada beberapa intonasi yang menyiratkan ketidakpercayaan diri diawal komunikasi, tetapi mereka menggunakan kata-kata yang mudah dipahami terkait dengan ideologi.

Sebagaimana ditekankan oleh Blumer, interaksi sosial membentuk perilaku manusia alih-alih sekadar sarana untuk mengekspresikan atau melepaskannya. Interaksi bergantung pada bahasa, simbol, dan makna bersama yang diucapkan dan tidak diucapkan. Hasil penelitian ini menjadi gambaran penting bahwa interaksi terjadi dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang membentuk tetapi tidak menentukannya. Di mana secara sosial, politisi perempuan memaknai humanism ideologi partai mereka dengan *rahmatan lil alamin*. Sedangkan secara budaya, mereka menganut syariat-syariat islam dan pengalaman mereka sebagai kader menjadi sejarah dalam mengekspresikan makna yang diucapkan. Interaksionisme simbolik mengasumsikan hubungan timbal balik antara interpretasi dan tindakan — masing-masing yang dapat menginformasikan satu sama lain (Blumer, 1969). Hal ini ditunjukkan oleh politisi perempuan yang dengan jelasnya memberikan pemaknaan mereka terkait ideologi partainya. Oleh sebab itu, ideologi yang dimiliki oleh partai politik akan memberikan identitas partai yang jelas. Sehingga, identitas tersebut memberikan kemudahan bagi partai politik untuk mendapatkan massa pendukung (Prasetya, 2011).

Orientasi teoretis Blumer sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di mana politisi perempuan sebagai manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya. Hal ini dapat ditunjukkan bagaimana mereka memahami rahmatan lil alamin sebagai dasar dari nilai-nilai syariat Islam yang ada pada Al-Qur'an. Begitu pula makna yang muncul dari pemahaman politisi perempuan ini didasari oleh interaksi sosial yang mereka miliki sebagai kader. Makna ditangani dan dimodifikasi melalui proses

penafsiran yang digunakan seseorang dalam menghadapi hal-hal yang ditemuinya.

Di sisi lain, penelitian ini sejalan dengan fenomenologi Schutz di mana makna yang disampaikan oleh politisi perempuan berdasarkan dari pengalaman yang mereka rasakan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian melalui wawancara dengan AM, KIP dan RH. Mereka mengalami sendiri makna rahmatan lil alamin melalui kegiatan politik yang dilakukan. Sehingga, politisi perempuan PKS melakukan proses tipikasi di mana mereka menyesuaikan interaksi dengan tema tipikasi yang dibuat. Oleh karena itu, dari setiap makna yang diperoleh dari politisi perempuan melalui cara tipikasi, kemudian diorganisasikan menjadi bentuk aturan-aturan. Salah satu bentuk aturan tersebut yaitu di mana politisi perempuan PKS ini memiliki pedoman pada aturan-aturan agama. Sehingga, ketika mereka memaknai rahmatan lil alamin, bentuk aturan dari partai adalah mereka harus siap berjuang dengan dana perjuangan atau dana infaq disaat terjun menjadi caleg. Dana infaq ini dikeluarkan di saat kegiatan berkampanye. Penafsiran rahmatan lil alamin ini juga menjadi bentuk aturan yang didasari oleh agama Islam di mana sebagai umat manusia kita harus memberikan kebaikan kepada sesama. Walaupun politisi perempuan PKS tidak memiliki dana yang banyak, mereka memberikan alternatif bantuan ilmu atau keterampilan yang dimiliki. Misalnya di saat RH menjabat, dirinya ikut berkontribusi membantu penyusunan proposal untuk pembangunan pesantren. Kondisi inilah yang menjadi proses tipikasi yang dihasilkan dari bentuk aturan-aturan pada PKS melalui Bayan DSP, konsep terkait rahmatan lil alamin, walidatul umat serta dakwah dan informasi lainnya dalam diri politisi perempuan PKS masing-masing.

Dalam konteks ini, PKS sebagai gerakan sosial lebih mempunyai makna bahwa politik tidak hanya dipersepsikan sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum. Hal tersebut dijelaskan oleh Sutarto (2011) bahwa makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah. Dakwah dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia seutuhnya agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kema'rufan dan

mencegah kemungkaran. Sehingga, dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen atau lebih kental lagi sebagai jihad siyasi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan sisi lain dari PKS yang dianggap cukup kontroversi karena fenomena muncul di mana PKS melegitimasi ajaran agama sebagai kekuatan politik, sistem, bahkan muncul kultur politik sebagai hasil konstruksi dari ajaran-ajaran agama. Tetapi, politisi perempuan PKS memaknai ajaran agama tersebut sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun ke dalam pedoman Bayan. Di dalam makna agamis tersebut, masih terdapat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tidak dilupakan oleh PKS sebagai partai Islam.

4. KESIMPULAN

Sesuai tujuan awal penelitian, yakni untuk mengetahui konstruksi makna ideologi parpol bagi politisi perempuan PKS, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa terdapat dua pemaknaan ideologi partai oleh politisi perempuan PKS yakni makna agamis dan makna humanis. Dalam makna agamis, diinterpretasikan bahwa agama menjadi dasar terjadinya dinamika sosial dan juga dinamika politik. Hal ini karena agama dimaknai sebagai pedoman nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari politisi perempuan PKS. Dalam prakteknya, agama bagi politisi perempuan PKS juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, karena politisi sebagai penganut agama senantiasa terikat kepada tuntunan ajaran agamanya baik secara pribadi maupun secara kelompok. Lebih jauh, ideologi partai bagi politisi perempuan PKS berpegang teguh pada Al-quran dan sunnah nabi (Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a) & Bayan serta dakwah tarbiyah.

Dalam makna humanis, makna tidak bisa dengan mudahnya muncul tetapi makna dihasilkan dari hubungan antar unsur baik di dalam maupun di luar. Sehingga ideologi partai bagi politisi perempuan adalah memiliki akhlak yang baik, kehidupan politik bagian dari kehidupan sehari-hari, menunjukkan keadilan dan kesejahteraan, perasaan bahagia, serta walidatul umat dan pemberdayaan umat. Mengingat ideologi partai Islam yang digunakan oleh PKS, politisi perempuan PKS juga

beranggapan bahwa perbedaan ini bukan masalah karena mempunyai tujuan yang sama yaitu Amal Makruf Nahi Mungkar yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran di muka bumi.

Ideologi partai Islam yang dibentuk oleh PKS diturunkan kedalam konsep kebaikan bersama yang dikenal dengan rehmatan lil alamin. Konsep ini didasari oleh syariat-syariat Islam sebagai bentuk keteguhan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep tersebut juga pada akhirnya menjadi sebuah ide di mana PKS sebagai partai Islam berupaya untuk ikut berkontribusi kepada kebaikan melalui dakwah.

Implikasi dari riset ini secara praktis dapat memberi wawasan pada para politisi, terutama politisi perempuan PKS, bahwa ideologi partai berbasis agama dapat dimakani sebagai bagian dari kegiatan ibadah sebagai makhluk tuhan dalam kesehariannya. Secara teoretis, penelitian ini mungkin dapat menambah khasanah kajian ilmu komunikasi politik dengan menekankan pada pendekatan interpretif khususnya fenomenologi.

Peneliti menyadari, terdapat keterbatasan dalam riset ini, terutama saat pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, yang secara ideal seharusnya sebagai sebuah riset fenomenologi, dilakukan secara langsung, namun karena pandemi Covid, peneliti terkendala untuk bertemu langsung dengan informan, sehingga wawancara dilakukan melalui Zoom dan video Call Whatsap.

Diharapkan ke depan riset ini dapat disempurnakan, terutama dalam mengelaborasi makna ideologi parpol dalam konteks memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender.

5. REFERENSI

- Aksan, N., Kisac, B., Aydin, M., & Demirbukan, S. (2009). Symbolic interaction theory. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 902–904. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.160>
- Andari, P. T. P., & Adnan, M. (2018). Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penentuan Caleg Perempuan pada Pileg 2014 di Kabupaten Grobogan. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 61–70. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Andrias, M. A., & Widiastuti, W. (2011). Persepsi Partai Politik terhadap Ketentuan Kuota 30% Perempuan dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Deskripsi Tentang Persepsi PKB, Golkar, PKS, PPP dan PDIP di Kabupaten Tasikmalaya). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 375–392.
- Anwar, I., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. (2020). Manhaj Tarbiyah for PKS Regional Representative Council: Enriching or Depressing the Political Environment in West Sumatra, Indonesia? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012040>
- Argenti, G. (2020). Jurnal Politikom Indonesiana : Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 37–57.
- Ariffin, M. (2019). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru. *Candrasangka: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 5(1), 12–22.
- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. (2006). *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Asih, I. D. (2005). Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali Ke Fenomena.” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(2), 75–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i2.164>
- Asma, K. (2021). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Karakteristiknya. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(85), 858–873.
- Bakiyah, H., Komunikasi, A., & Jakarta, B. (2018). Tindakan Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 224–230.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Blumer, Herbert. (1986). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.
- Brilliant, C., Tawakkal, G. T. I., & Rohman, A. Z. F. (2022). Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketiadaan Politikus Perempuan Partai

- Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Trenggalek. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 183–196. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23304>
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Carter, M. J., & Fuller, C. (2016). Symbols, meaning, and action: The past, present, and future of symbolic interactionism. *Current Sociology*, 64(6), 931–961. <https://doi.org/10.1177/0011392116638396>
- Creswell, J. (2017). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fourth). Sage Publication.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Dewan Syariah PKS. (2015). *Fatwa dan Bayan Dewan Syariah PKS*.
- Dewi, E. A. S., & Shalisa, A. (2020). Political communication experiences of Sundanese muslim women politicians. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(1), 121–138.
- Eagleton, T. (1991). *Ideology: An Introduction* (Updated ed). Versos.
- Endo, Y., & Ono, Y. (2023). Opposition to Women Political Leaders: Gender Bias and Stereotypes of Politicians Among Japanese Voters. *Journal of Women, Politics and Policy*, 44(3), 371–386. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2023.2174365>
- George Rizer, D. J. G. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group.
- Gerald, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 134–157. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>
- Hafiar, H. (2012). Cacat dan Prestasi melalui Pengalaman Komunikasi Atlet Penyandang Cacat. *IJAD: Indonesian Journal of Dialectics*, 2(1).
- Hefni, H. (2017). Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil'Alamin di Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1438>
- Herdiansah, A. G. (2021). Intra-party Conflict and the Emergence of Islamic-Based Parties in the post-2019 Election in Indonesia. *Journal of Governance*, 6(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12700>
- Heywood, A. (2012). *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Iswandi. (2020a). Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019. *Politica*, 7(1), 3–21.
- Kompas.com. (2018). *PKS Ungkap Jumlah Caleg Perempuan 212 Orang*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/05300221/pks-ungkap-jumlah-caleg-perempuan-212-orang>
- Kusmayadi, E. (2018). Studi Komparasi Pemaknaan Agama dalam Partai Politik PPP, PKB, PAN dan PKB Kota Tasikmalaya Edy. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 111–118.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi: Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Widya Padajaran.
- McNair. (2003). *Introduction of Political Communication*. Library Cataloging Publication.
- McRae, D. (2013). Indonesian politics in 2013: the emergence of new leadership? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(3), 289–304. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.850629>
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self and society*. University of Chicago Press.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publications Inc.
- Mulia, S. M., & Farida, A. (2005). *Perempuan dan Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, D. (2021). *Ilmu Komunikasi Suatu*

Pengantar. Remaja Rosdakarya.

- Natter, K., Czaika, M., & de Haas, H. (2020). Political party ideology and immigration policy reform: an empirical enquiry. *Political Research Exchange*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1735255>
- Nelson, L. D. (1998). *Herbert Blumer's symbolic interactionism*.
- Neuman, W. L. (2003). *Qualitative and Quantitative Approaches* (5th ed.). Pearson Education
- Nurhakim, M. (2023). Kebebasan Beragama dalam Negara Demokrasi: Perspektif Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 18(2), 124–136. <https://doi.org/10.56338/iqra.v18i2.3643>
- Nurussa'adah, E. (2018). Nilai Keterbukaan Ideologi Partai Islam dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 975. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.343>
- NZ, N., & Sitepu, A. (2017). Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 93–110.
- Ordabayeva, N., & Fernandes, D. (2018). Better or different? How political ideology shapes preferences for differentiation in the social hierarchy. *Journal of Consumer Research*, 45(2), 227–250. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucy004>
- Osgood, C. E., Suci, G. C., & Tannenbaum, P. H. (1957). *The Measurement of meaning*. University of Illinois Press.
- Parmudi, M., Warsito, T., & Jatmika, S. (2018). Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 143. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2826>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Pohan, A. (2012). Gender dalam Komunikasi Politik Aktivistis Partai Islam (Analisis terhadap Aktivitas PBB, PPP dan PKS di Padang. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2(1), 24–38.
- Pradiansyah, A. (2019). *Makna Rahmatan Lil 'Ālamîn dalam Al-Qur'an, QS. Al-Anbiyâ' Ayat 107*. Islamic.Co.
- Prasetya, I. Y. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Rahmatya, M. D. (2012). Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 117–127.
- Ramadhani, Y. (2021). Ideologi Keagamaan, Partai Politik, dan Pendidikan Islam: Refleksi Pemikiran Hasan Al-Banna di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2455>
- Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press.
- Schwarz, G., Eva, N., & Newman, A. (2020). Can Public Leadership Increase Public Service Motivation and Job Performance? *Public Administration Review*, 80(4), 543–554. <https://doi.org/10.1111/puar.13182>
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*. Alfabeta. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.01.004>
- Wahyudi, J. (2022). Pudarnya Ideologi Partai Islam Pascareformasi: Telaah atas Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Pemilu 2009-2019. *Politea*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.14849>
- Walahe, D. (2018). Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1).

<https://doi.org/10.32662/gjpad.v1i1.175>

Yasin, R. C. L. (2017). *The Attitude of PKS on the Implementation of Sharia in Democratic Indonesia* [Deakin University].

<http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30111038>

Yılmaz, O., Sarıbay, S. A., Bahçekapılı, H. G., & Harma, M. (2016). Political orientations, ideological self-categorizations, party preferences, and moral foundations of young Turkish voters. *Turkish Studies*, 17(4), 544–566.

<https://doi.org/10.1080/14683849.2016.1221312>

Yuniartin, T. (2018). Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(2), 257–274.

<https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1325>